

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Suara Merdeka

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Kerugian Negara Kasus Banprov Rp 11 Miliar

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/201429/kerugian-negara-kasus-banprov-rp-11-miliar>

SEMARANG - Kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan provinsi (banprov) Jateng 2018 untuk Kabupaten Kendal dan Pekalongan diperkirakan mencapai Rp 11 miliar, atau ada penambahan dari estimasi sebelumnya yakni Rp 8,2 miliar.

Perhitungan kerugian itu diperoleh setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Artinya, ada penambahan jumlah kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar.

"Ada peningkatan kerugian negara yang signifikan," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ketut Sumedana di Kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Senin (7/10). Dalam perkara ini, sejumlah pejabat di lingkungan DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 diperiksa sebagai saksi.

Di antaranya mantan Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi, Ketua Komisi C dan E DPRD. Pada periode itu, Ketua Komisi E dijabat oleh AS Sukawijaya (Yoyok Sukawi), sedangkan jabatan Ketua Komisi C dipegang Asfirla Harisanto. Ketut menyatakan, sejauh ini tim penyidik sudah memeriksa 100 saksi lebih.

Empat di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kendati tak menyebut detail nama dari para tersangka, namun baik di Kendal maupun di Pekalongan sama-sama berasal dari unsur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak ketiga atau swasta. Kedua kabupaten tersebut menerima dana banprov Rp 22,5 miliar dari total Rp 1,14 triliun yang diterima seluruh kabupaten/kota di Jateng.

Rinciannya, Rp 12 miliar diterima Kabupaten Pekalongan dan Rp 10,5 miliar untuk Kabupaten Kendal. Dugaan penyelewengan anggaran terjadi pada sektor pendidikan. Bentuk penyimpangan berupa pengadaan laptop yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Harga barang di atas harga pasaran.

Kontrak kerja bahkan dilakukan sebelum anggaran turun," ujarnya. Pengadaan laptop di Kabupaten Kendal sebanyak 854 unit dengan nilai kontrak Rp 8 miliar. Adapun di Kabupaten Pekalongan sebanyak 897 unit dengan nilai kontrak Rp 9 miliar. Fasilitas laptop tersebut diperuntukan bagi sejumlah kepala sekolah. **(ftp-64)**

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH